

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMUJU, SULAWESI BARAT

Puput Merianti¹⁾, Herlina²⁾, Hari Yeni³⁾

¹⁾Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju, Indonesia
Email: puputmerianti3@gmail.com

²⁾Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju, Indonesia
Email: herlinalina03jie@gmail.com

³⁾Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju, Indonesia
Email: hariyeni7@gmail.com

Abstract

The implementation of information systems in personnel management has become an important effort for public sector organizations to improve administrative effectiveness and human resource management. This study aims to analyze the implementation of the Personnel Management Information System (SIMPEG) at the Education Office of Mamuju Regency, West Sulawesi. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consist of structural officials, SIMPEG administrators, and system users. The findings indicate that SIMPEG has been implemented in managing personnel data and contributes to improving administrative efficiency, data organization, and accessibility. However, the implementation has not yet been fully optimized. This condition is influenced by variations in human resource capabilities, limitations in technological infrastructure, and the lack of structured training and system socialization. The results suggest that the success of SIMPEG implementation is not solely determined by technical aspects but also by management support and organizational readiness. Therefore, strengthening human resource competencies and improving supporting infrastructure are necessary to ensure more effective and sustainable utilization of SIMPEG.

Keywords: Management Information System, SIMPEG, Personnel Management, Public Sector.

Abstrak

Penerapan sistem informasi dalam pengelolaan kepegawaian merupakan salah satu upaya instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas administrasi dan kualitas pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat struktural, pengelola SIMPEG, serta pegawai pengguna sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMPEG telah diterapkan dalam pengelolaan data kepegawaian dan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi serta kerapihan dan kemudahan akses data. Namun demikian, implementasi sistem belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh variasi kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta minimnya pelatihan dan sosialisasi penggunaan sistem. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIMPEG tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh dukungan manajemen dan kesiapan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi pegawai dan penguatan sarana pendukung agar SIMPEG dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, SIMPEG, Kepegawaian, Instansi Pemerintah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan sistem administrasi konvensional yang cenderung lambat, tidak terintegrasi, dan rawan kesalahan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi sistem berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan.

Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). SIMPEG dirancang sebagai sistem terintegrasi yang berfungsi untuk mengelola seluruh data dan informasi kepegawaian secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui SIMPEG, pengelolaan data pegawai seperti identitas personal, pangkat dan golongan, jabatan struktural maupun fungsional, latar belakang pendidikan, serta riwayat karier dapat dilakukan secara lebih tertata dan mudah diakses.

Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, SIMPEG memiliki peran strategis dalam mendukung manajemen sumber daya manusia aparatur. Sistem ini diharapkan mampu menjadi basis data yang akurat dan mutakhir dalam proses perencanaan kepegawaian, pengembangan karier, mutasi, promosi, hingga penilaian kinerja pegawai. Dengan tersedianya informasi yang lengkap dan terintegrasi, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Meskipun demikian, implementasi SIMPEG dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi, kurangnya pembaruan data secara berkala, serta kendala infrastruktur teknologi informasi menjadi faktor yang dapat menghambat optimalisasi sistem. Selain itu, tingkat pemahaman dan komitmen pegawai terhadap penggunaan SIMPEG juga berpengaruh terhadap efektivitas penerapannya di lingkungan kerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi SIMPEG di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana SIMPEG telah diterapkan, bagaimana perannya dalam mendukung pengelolaan kepegawaian, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan kinerja sistem dan perbaikan tata kelola kepegawaian di instansi tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Publik

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem terintegrasi yang dirancang untuk menyediakan

informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat guna mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial (2005). Dalam organisasi sektor publik, SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi (2016).

Penerapan SIM di instansi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta karena dipengaruhi oleh struktur birokrasi, regulasi, serta budaya organisasi yang cenderung hierarkis (2012). Oleh karena itu, analisis implementasi SIM di sektor publik perlu menggunakan kerangka teori yang mempertimbangkan aspek teknis dan non-teknis secara bersamaan.

2. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan subsistem dari SIM yang berfokus pada pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia aparatur. SIMPEG mencakup pengelolaan data pegawai, pangkat dan golongan, jabatan, pendidikan, pelatihan, serta riwayat karier secara terintegrasi (2011).

SIMPEG dirancang untuk mengatasi permasalahan pengelolaan kepegawaian yang bersifat manual, lambat, dan rentan terhadap kesalahan administrasi. Implementasi SIMPEG yang efektif diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, serta mendukung pengambilan keputusan kepegawaian berbasis data (2015).

Namun demikian, keberhasilan SIMPEG tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan sistem kerja dan pola pikir pegawai (1995).

3. Teori Implementasi Sistem Informasi

Implementasi sistem informasi dipahami sebagai suatu proses penerapan sistem yang dimulai dari tahap perencanaan, pengembangan, hingga pemanfaatan secara rutin dalam aktivitas organisasi. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga melibatkan interaksi yang kompleks antara manusia, teknologi, dan struktur organisasi (1995). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sistem informasi tidak dapat dilihat semata-mata dari kesiapan teknis, melainkan juga dari kesiapan organisasi dan pengguna sistem.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kegagalan implementasi sistem informasi sering kali disebabkan oleh

kurangnya perhatian terhadap faktor manusia dan organisasi dibandingkan dengan fokus pada aspek teknis semata (2012). Faktor seperti resistensi pengguna, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, serta lemahnya komitmen organisasi dapat menghambat pemanfaatan sistem secara optimal.

Kerangka implementasi sistem informasi menekankan beberapa faktor kunci yang saling berkaitan, antara lain dukungan manajemen, kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta adanya pelatihan bagi pengguna sistem (2018). Sinergi antar faktor tersebut menjadi penentu utama keberhasilan penerapan sistem informasi, khususnya dalam organisasi publik yang memiliki karakteristik birokrasi yang kompleks.

4. Keberhasilan Sistem Informasi

Keberhasilan sistem informasi merupakan konsep penting dalam menilai sejauh mana sistem mampu memberikan manfaat bagi individu dan organisasi. Salah satu model yang banyak digunakan dalam kajian sistem informasi adalah model keberhasilan sistem informasi yang menekankan pada kualitas sistem, kualitas informasi, serta dampak penggunaan sistem terhadap kinerja individu dan organisasi (2003). Model ini menegaskan bahwa sistem yang berkualitas tinggi dan menghasilkan informasi yang akurat akan meningkatkan kepuasan serta intensitas penggunaan oleh pengguna.

Dalam konteks Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), keberhasilan sistem dapat dilihat dari meningkatnya efisiensi administrasi kepegawaian, kemudahan akses dan pengelolaan data pegawai, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan manajerial (2020). SIMPEG yang berhasil diimplementasikan akan mampu mendukung transparansi, akurasi data, dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

Selain itu, keberlanjutan penggunaan sistem informasi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Apabila sistem dianggap sulit digunakan atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka tingkat pemanfaatannya akan cenderung rendah meskipun sistem tersebut telah tersedia secara teknis (1989).

5. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SIMPEG di instansi pemerintah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan administrasi

kepegawaian, khususnya dalam meningkatkan kecepatan pelayanan dan akurasi data pegawai (2019). Sistem ini dinilai mampu mengurangi kesalahan administrasi serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut juga mengungkap berbagai kendala dalam implementasi SIMPEG, seperti keterbatasan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem, rendahnya literasi teknologi, serta kurangnya pelatihan yang berkelanjutan (2021). Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan sistem belum optimal dan cenderung hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan administratif tertentu.

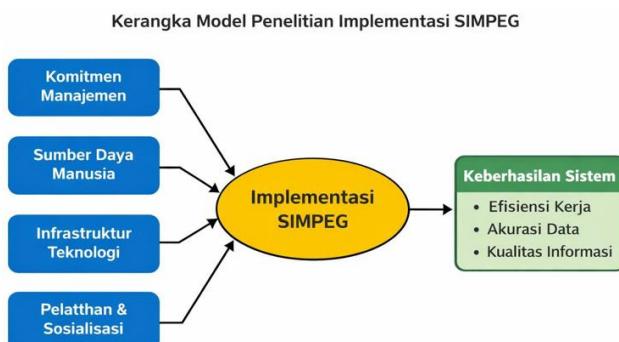
Penelitian lain menegaskan bahwa dukungan pimpinan dan kebijakan internal organisasi merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi sistem informasi di lingkungan birokrasi (2022). Tanpa komitmen dan dukungan manajemen, pemanfaatan sistem informasi sering kali bersifat formalitas dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses kerja organisasi.

Meskipun kajian mengenai SIMPEG telah cukup banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada instansi pemerintah di wilayah perkotaan atau pada tingkat pemerintah provinsi. Kajian yang secara khusus meneliti implementasi SIMPEG di tingkat kabupaten, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, masih relatif terbatas.

6. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian implementasi SIMPEG di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki karakteristik geografis, infrastruktur teknologi, dan dinamika birokrasi yang berbeda dibandingkan dengan daerah yang lebih maju. Kondisi tersebut memberikan konteks empiris yang khas dalam mengkaji penerapan sistem informasi kepegawaian di tingkat pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis implementasi SIMPEG, tetapi juga mengintegrasikan faktor sumber daya manusia dan konteks organisasi publik daerah dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian implementasi sistem informasi kepegawaian di tingkat pemerintah daerah, serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan peningkatan tata kelola kepegawaian berbasis teknologi.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses penerapan sistem serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju dengan subjek penelitian meliputi pejabat struktural, pengelola SIMPEG, dan pegawai pengguna sistem. Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIMPEG.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati penggunaan SIMPEG dalam aktivitas administrasi kepegawaian, wawancara untuk menggali persepsi dan pengalaman pengguna, serta dokumentasi untuk melengkapi data pendukung terkait kebijakan dan laporan kepegawaian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode. Analisis difokuskan pada peran komitmen manajemen, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta pelatihan dan sosialisasi dalam mendukung implementasi SIMPEG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) telah digunakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Sistem ini dimanfaatkan untuk pengelolaan data pegawai, meliputi identitas pegawai, pangkat dan golongan, jabatan, serta riwayat pendidikan dan kepegawaian. Data

kepegawaian disimpan dan diperbarui melalui sistem terkomputerisasi, sehingga mengantikan sebagian besar proses pencatatan manual yang sebelumnya digunakan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, penggunaan SIMPEG telah diterapkan oleh unit kerja yang menangani administrasi kepegawaian. Namun, tingkat pemanfaatan sistem di antara pegawai menunjukkan variasi. Sebagian pegawai secara aktif menggunakan SIMPEG dalam kegiatan administrasi, sementara sebagian lainnya masih terbatas pada fungsi tertentu, seperti penginputan atau pembaruan data dasar pegawai.

Dari aspek sumber daya manusia, ditemukan bahwa kemampuan pegawai dalam mengoperasikan SIMPEG belum merata. Pengelolaan dan pembaruan data kepegawaian masih terpusat pada pegawai tertentu yang memiliki pemahaman teknis lebih baik terhadap sistem. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada beberapa pegawai dalam proses administrasi kepegawaian berbasis sistem.

Dari sisi sarana pendukung, perangkat komputer dan jaringan internet telah tersedia untuk mendukung penggunaan SIMPEG. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala teknis berupa gangguan jaringan dan keterbatasan akses sistem pada waktu tertentu, yang berdampak pada kelancaran proses pembaruan data secara bersamaan.

Terkait pelatihan dan sosialisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan penggunaan SIMPEG belum dilakukan secara rutin dan terstruktur. Sebagian besar pegawai memperoleh pengetahuan penggunaan sistem melalui pembelajaran mandiri atau bantuan rekan kerja. Kondisi ini berpengaruh terhadap pemanfaatan fitur SIMPEG yang belum digunakan secara menyeluruh.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMPEG telah digunakan sebagai sistem pendukung pengelolaan administrasi kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju. Sistem ini memudahkan penyimpanan dan pencarian data kepegawaian dibandingkan dengan sistem manual, namun pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal oleh seluruh pegawai.

Pembahasan

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan organisasi publik menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi kepegawaian tidak dapat dilepaskan dari

kesiapan organisasi secara menyeluruh. Temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa sistem informasi manajemen pada sektor publik berfungsi tidak hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai bagian dari proses perubahan tata kelola birokrasi menuju pengelolaan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik (2005).

Variasi tingkat pemanfaatan SIMPEG di antara pegawai mencerminkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan kerangka implementasi sistem informasi yang menekankan bahwa kompetensi pengguna merupakan elemen kunci dalam memastikan sistem dapat digunakan secara optimal dalam aktivitas organisasi sehari-hari (1995). Ketergantungan pada pegawai tertentu menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan yang berpotensi menghambat keberlanjutan pemanfaatan sistem secara merata.

Dari perspektif organisasi, kondisi tersebut juga berkaitan dengan peran manajemen dalam mengarahkan dan mengendalikan penggunaan sistem informasi. Literatur menyebutkan bahwa dukungan manajemen yang efektif tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan penerapan sistem, tetapi juga melalui pengawasan, evaluasi, dan penguatan kapasitas pengguna (2018). Tanpa mekanisme tersebut, sistem informasi cenderung digunakan secara terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses kerja organisasi.

Ketersediaan infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya andal menunjukkan bahwa kualitas sistem dan lingkungan teknis turut menentukan kelancaran penggunaan sistem informasi. Hal ini sejalan dengan model keberhasilan sistem informasi yang menempatkan kualitas sistem sebagai prasyarat tercapainya manfaat organisasi (2003). Infrastruktur yang kurang stabil berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan dan intensitas penggunaan sistem oleh pegawai.

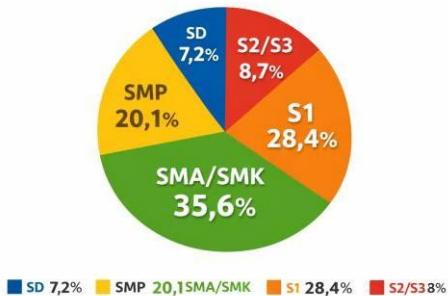
Selain itu, keterbatasan pelatihan dan sosialisasi memperkuat pandangan bahwa penerimaan dan pemanfaatan sistem informasi sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kemudahan dan manfaat sistem. Apabila pengguna tidak memperoleh pembekalan yang memadai, maka sistem berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal meskipun secara fungsional telah tersedia (1989). Hal ini menegaskan pentingnya pelatihan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi implementasi sistem informasi di instansi pemerintah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi SIMPEG merupakan proses yang bersifat multidimensional, melibatkan aspek teknis, manusia, dan organisasi. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem informasi kepegawaian di sektor publik sangat bergantung pada integrasi antara teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan organisasi secara berkelanjutan (2020).

Tabel 1. Indeks Harapan Konsumen & Kinerja Pelayanan
Tahun 2019

Dimensi Pelayanan	Indeks Harapan	Indeks Kinerja	Gap Indeks
Reliability	4,52	3,96	0,56
Responsive nes	4,47	3,88	0,59
Assurance	4,50	4,01	0,49
Empathy	4,48	3,92	0,56
Tangibles	4,45	3,85	0,60
Rata-rata	4,48	3,92	0,56

Percentase Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1. Persentase Tenaga Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) telah diimplementasikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju sebagai bagian dari upaya peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pemanfaatan sistem tersebut berkontribusi terhadap kemudahan pengelolaan data pegawai, kerapuhan dokumentasi, serta efisiensi proses administrasi. Meskipun demikian, implementasi SIMPEG belum sepenuhnya berjalan secara optimal, yang ditandai oleh perbedaan tingkat pemanfaatan sistem antarpegawai, keterbatasan kompetensi pengguna, serta kendala pada

infrastruktur pendukung dan pelaksanaan pelatihan yang belum berkesinambungan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian terbatas pada satu instansi pemerintah, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga belum memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat kinerja sistem maupun kepuasan pengguna. Data penelitian juga bergantung pada informasi yang diperoleh dari informan, sehingga masih dimungkinkan adanya perbedaan persepsi.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih dari satu instansi serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji faktor-faktor organisasi yang memengaruhi keberhasilan implementasi SIMPEG, seperti dukungan pimpinan, kebijakan internal, dan integrasi sistem informasi kepegawaian dengan sistem lain di lingkungan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia Ismail, M., Anggoro, A. R., & Daweng, M. Y. (2025). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dinas Pendidikan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(4), Article 1068. <https://doi.org/10.70248/jmie.v1i4.1068>
- Amirova, A., et al. (2025). The impact of digital HRM implementation on public sector performance: A quantitative analysis of service delivery efficiency. *Economics*, 13(3), 303–318. <https://doi.org/10.2478/eoik-2025-0067>
- Andranti, P. R., & Nurlaila, N. (2024). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 10–21. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1690>
- Fermi Yunita, B., & Abdi, A. (2024). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(5), Article 8378. <https://doi.org/10.26618/kimap.v3i5.8378>
- Iriyanti, N., Setyorini, N., & Putri, N. K. (2025). Pengaruh penggunaan Human Resource Information System (HRIS) terhadap kinerja pegawai dengan job involvement sebagai variabel mediasi. *Journal of Indonesian Management*, 5(2), Article 2439. <https://doi.org/10.53697/jim.v5i2.2439>
- Nurhasanah, N., Manurung, L., & Julaeha, S. (2023). Analisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 11(1). <https://doi.org/10.31289/publika.v11i1.9521>
- Putri Rachma Sholeha. (2023). Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian dalam manajemen PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 3(1), Article 942. <https://doi.org/10.37090/jpap.v3i1.942>
- Sariasisih, K. Y., & Wijaya, K. A. S. (2025). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam mendukung e-Government pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 13. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4173>